

Dinamika Politik Praktis dalam Sikap dan Peran Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara

Wirman¹, Ridha Nida Neilofer Nasution²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; wirman@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; ridhaneilofer@gmail.com

Received: 01/02/2025

Revised: 20/02/2025

Accepted: 27/02/2025

Abstract

This study explores the dynamics of practical politics among Islamic mass organizations in North Sumatra and examines how Pelajar Islam Indonesia (PII) responds to the increasing political engagement of major Islamic organizations. The study addresses the question of how PII positions itself amid the tension between pragmatic political practices and the normative mission of Islamic student movements. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation within the organizational environment of PII in North Sumatra. The data were analyzed inductively to capture the meanings and social interpretations articulated by organizational actors. The findings demonstrate that PII consistently adopts an institutional stance of political neutrality by rejecting direct involvement in practical politics and prioritizing its educational mission, cadre development, and moral formation. This stance reflects an effort to safeguard Islamic values, student activism, and Indonesian nationalism from partisan political interests. The study argues that PII's neutrality represents a form of moral-political engagement rather than political apathy, positioning the organization as a critical ethical buffer that reinforces the independence and integrity of Islamic student movements within a pragmatically driven political landscape.

Keywords

Islamic mass organizations; Pelajar Islam Indonesia; political neutrality; practical politics; student movement

Corresponding Author

Wirman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; wirman@uinsu.ac.id

1. PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) memainkan peran strategis dalam lanskap sosial-politik Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer. Di bawah rezim Orde Baru, keterlibatan ulama dan organisasi Islam dalam politik praktis tidak hanya dipandang sebagai ekspresi identitas Muslim, tetapi juga dinilai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik negara. Kondisi tersebut memperlihatkan dinamika ambivalen: di satu sisi politik dapat menjadi sarana perubahan sosial, namun di sisi lain ia dapat mengaburkan nilai moral dan keagamaan jika dikelola secara pragmatis (Latifah, 2024).

Dalam konteks modern, partisipasi Ormas Islam semakin menguat. Organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dikenal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik dan kebijakan sosial-politik. Meskipun secara formal menegaskan peran dakwah dan pendidikan, kedua organisasi tersebut secara historis tidak terlepas dari aktivitas politik dalam berbagai bentuk, baik melalui advokasi kebijakan maupun dukungan moral terhadap kontestasi



politik tertentu. Di Sumatera Utara, Al-Washliyah juga menunjukkan pola serupa dengan pendekatan yang berakar kuat pada dinamika lokal (Sahputra, 2018; Saleh, 2024).

Namun, keterlibatan dalam politik praktis menghadirkan dilema ideologis dan struktural. Sebagian pihak berpendapat bahwa keterlibatan ulama dalam politik diperlukan untuk memastikan keberpihakan moral terhadap kepentingan umat, sementara pihak lain menilai bahwa politik dapat mengalihkan organisasi Islam dari tujuan dakwah dan pendidikan nilai spiritual. Ketegangan pemikiran ini memperlihatkan adanya kontestasi antara “politik moral” dan “politik pragmatis,” serta mengundang diskusi mengenai batasan ideal peran sosial keagamaan (Noprijon et al., 2025).

Dalam konteks pelajar, dinamika tersebut menjadi penting karena mereka merupakan kelompok pembentuk karakter dan kepemimpinan bangsa di masa depan. Pelajar Islam Indonesia (PII), sebagai salah satu organisasi pelajar tertua di Indonesia, menempatkan nilai keislaman, kepelajaran, dan keindonesiaan sebagai pedoman dasar gerak organisasi (Vira et al., 2024). Meski demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana PII merespons situasi ketika ormas besar di sekitarnya menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan peran Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara terhadap keterlibatan Ormas Islam dalam politik praktis. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PII menjaga independensi gerakan pelajar, memperkuat nilai moral, serta membangun literasi politik berbasis etika Islam di tengah tekanan dan ekspektasi politik kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa PII cenderung menegaskan netralitas politik organisasi sambil tetap mengedepankan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan kesadaran kebangsaan (Setiawan et al., 2024).

Kajian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan ormas-ormas tersebut dalam proses elektoral dan advokasi kebijakan di Sumatera Utara menimbulkan pergeseran orientasi aksi kolektif—dari pelayanan sosial menuju strategi politik yang terorganisir—sehingga mempengaruhi cara umat Islam berjejaring dan berpartisipasi dalam ruang publik. Temuan ini berkontribusi pada diskursus mengenai batas ideal peran organisasi keagamaan dalam politik, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai strategi organisasi pelajar dalam menjaga integritas nilai dakwah dan pendidikan pada era demokrasi modern. Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara menempati posisi kritis sebagai organisasi kepelajaran yang berpotensi menjadi penyangga moral dan kaderisasi bagi generasi muda Muslim (Yahya & Sahidin, 2022).

Bukti empiris dari kegiatan dan program PII—termasuk pelantikan pengurus wilayah 2023–2025, konferensi daerah dan program kepemimpinan (LBT/LIT/KP2M)—memperlihatkan fokus organisasi pada pendidikan, pembinaan kader, dan penguatan identitas pelajar Islam, yang relevan sebagai respons terhadap politisasi ormas dewasa. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menguji sejauh mana PII mampu mempertahankan netralitas institusional dan fungsi edukatifnya sekaligus berperan sebagai agen penyangga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tengah meningkatnya tekanan politik praktis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika politik praktis yang berkembang di lingkungan organisasi masyarakat Islam serta bagaimana Pelajar

Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara menyikapi fenomena tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, dan sikap aktor organisasi secara kontekstual, sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif berupaya menangkap realitas sosial melalui kata-kata, tindakan, dan perilaku yang diamati dalam situasi alami (Rachman et al., 2024).

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengurus dan anggota PII Sumatera Utara melalui observasi dan wawancara mendalam. Data ini berhubungan langsung dengan fokus penelitian karena mencerminkan pengalaman, sikap, dan pandangan internal PII terhadap politik praktis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, arsip, catatan kegiatan, serta literatur yang relevan untuk memperkuat dan melengkapi data primer (Sari et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menelaah data sejak sebelum penelitian lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah penelitian selesai. Data yang diperoleh diklasifikasikan, disusun ke dalam tema-tema utama, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola serta makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, sehingga hasil penelitian mampu menjelaskan peran dan sikap PII Sumatera Utara dalam menghadapi politik praktis Ormas Islam secara sistematis dan bermakna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia

Pada tanggal 4 Juli 1947, di Yogyakarta, Pelajar Islam Indonesia didirikan oleh Djoesdi Ghozali. Ia adalah seorang sarjana hukum di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Islam, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Indonesia. Ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1923, di kota Klaten. Dorongan utama di balik pembentukan organisasi PII adalah dikotomi yang ada dalam kerangka pendidikan bagi umat Islam Indonesia, sisa-sisa penjajahan Belanda, yang ditandai dengan pemisahan antara pesantren dan sekolah negeri, yang masing-masing dianggap memiliki orientasi yang berbeda. Pesantren berfokus pada kehidupan setelah kematian, sementara sekolah negeri diarahkan pada hal-hal duniawi. Akibatnya, para pelajar Islam terpecah menjadi dua kubu, yang masing-masing berusaha untuk menumbangkan yang lain. Para pelajar di pesantren menganggap sekolah negeri sebagai sistem pendidikan yang ternoda oleh kekafiran, menganggapnya sebagai warisan penjajahan Belanda (Pakpahan et al., 2024; Surpani, 2023).

Hal ini mendorong para pelajar untuk menggolongkan peserta didik sekolah negeri sebagai "pelajar kafir". Sementara itu, para siswa dari sekolah-sekolah negeri menganggap pesantren kuno dan konvensional, melabeli mereka sebagai "santri kolot". Mengingat situasi ini, pada tanggal 25 Februari 1947, ketika Djoesdi Ghozali sedang iktikaf di Masjid Agung Kauman di Yogyakarta, ia menggagas gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi bagi para siswa Islam yang akan berfungsi untuk mencakup semua tingkatan beasiswa Islam. Konsep ini muncul dari refleksi mendalam di Masjid Kauman dan kemudian diartikulasikan dalam sebuah pertemuan di lingkungan SMP Negeri 2 Secodiningrat, Yogyakarta (Hoddin, 2020).

Rekan-rekan yang hadir pada pertemuan tersebut, termasuk Anton Timur Djaelani, Amien Syahri, Ibrahim Zakhasyi, dan Noersjaf, secara kolektif mencapai konsensus untuk mendirikan sebuah organisasi siswa Islam. Hasil kesepakatan yang dicapai oleh rekan-rekan Djoesdi Ghozali kemudian dipresentasikan pada Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), yang diadakan dari tanggal 30 Maret hingga 1 April 1947, di Gedung Muailimin. Djoesdi Ghozali menyampaikan konsep tersebut kepada para peserta kongres. Hasil pertemuan ini berpuncak pada resolusi pembentukan organisasi mahasiswa Islam yang terpadu dan otonom, yang diberi nama Pelajar Islam Indonesia (PII) (Rohman et al., 2024).

Untuk memajukan resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam kongres GPII di gedung Muallimin, sebuah pertemuan diselenggarakan pada hari Minggu, 4 Mei 1947, di kantor GPII yang terletak di Jalan Margomulyo No. 8, Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi mahasiswa Islam setempat, yang siap bersatu di bawah naungan Organisasi Mahasiswa Islam yang baru didirikan. Yang hadir antara lain Djoesdi Ghozali, Ibrahim Zarkasyi, beserta delegasi dari organisasi-organisasi Mahasiswa Islam setempat yang telah mapan: (1.) Yahya Ubeid, perwakilan Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS). (2.) Multazam dan Shawabi, perwakilan Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PERSIKEM). (3.) Dida Gursida dan Supomo NA, perwakilan Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PPII) Yogyakarta (Novrandianti et al., 2024).

Tak lama setelah pembentukan PII pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer perdananya. Selama periode agresi ini, anggota PII terlibat dalam revolusi fisik, dan mendirikan Brigade PII di Ponorogo pada tanggal 6 November 1947, di bawah pimpinan Abdul Fattah Permana. Brigade PII berfungsi sebagai entitas independen, yang dicirikan oleh struktur milisi atau tentaranya. Meskipun diresmikan secara resmi pada tahun 1947, aktivitas brigade telah berlangsung di dalam PII sebelum pembentukan Brigade PII, terutama dengan TPI (Tentara Mahasiswa Islam Aceh). Organisasi ini beranggotakan 12.000 orang, yang semuanya dikoordinasikan dengan cermat di bawah wewenang Komandan Koordinasi Pusat Brigade PII selama periode tersebut (Muhajir & Wulandari, 2023).

Pada tahun 1945, GPII berhasil menggagalkan invasi ideologi kiri ke dalam organisasi-organisasi pemuda Indonesia, sebuah gerakan yang kemudian berpuncak pada Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Demikian pula, PII dengan cekatan melindungi organisasi-organisasi mahasiswa dari pengaruh ideologi komunis. PII, beserta brigade-brigadenya, terlibat dalam pertempuran bersama berbagai milisi Indonesia di garis depan untuk menggagalkan penjajah yang ingin menjajah kembali bangsa dan untuk menekan pemberontakan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO), yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah Muso di Madiun pada tahun 1948 (Pulungan et al., 2025).

Politik Praktis di Kalangan Organisasi Masyarakat Islam

Hasil wawancara dengan sekretariat Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama, IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama). Maka dari itu, peneliti mewawancarai wakil ketua dari IPNU atas nama Muhammad Fakhri Hasibuan, M.Ag. Penulis juga melakukan penelitian kepada pimpinan Al-Jamiyatul Washliyah. Namun dikarenakan adanya kesalahan komunikasi terhadap pihak pengurus, maka dari itu penulis diarahkan menemui Bapak Muhammad Irfan selaku Pengurus pusat Al-Jamiyatul Washliyah. Pimpinan IPNU menceritakan latar belakang-nya di organisasi tersebut:

“Saya saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Utara. Dalam posisi ini, saya berperan membantu Ketua dalam menjalankan roda organisasi,

terutama dalam bidang pengembangan kader, penguatan ideologi Aswaja, serta menjaga marwah organisasi di tengah dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Sumatera Utara. Saya juga ikut mengoordinasikan program-program kaderisasi dan advokasi pelajar agar IPNU benar-benar menjadi wadah pembinaan intelektual, spiritual, dan sosial bagi generasi muda NU. Saya telah aktif di IPNU selama kurang lebih 9 tahun, dimulai dari tingkat komisariat, kemudian naik ke cabang, hingga kini di tingkat wilayah. Selama perjalanan tersebut, saya banyak belajar tentang nilai-nilai ke-NU-an, manajemen organisasi, serta bagaimana menjaga netralitas dan integritas di tengah tantangan politik yang kompleks". (Muhammad Fakhri Hasibuan M.Ag, Rabu, 08 Oktober 2025, 13:00 WIB). Pimpinan Al-Washliyah juga menjelaskan sedikit latar belakangnya didalam organisasi tersebut "Saya merupakan salah satu Pengurus Pusat Al-Jami'atul Washliyah dan saya sudah kurang lebih 10 tahun di Al-Jami'atul Washliyah" (Wawancara dengan Muhammad Irfan, 2025).

Pimpinan IPNU menyatakan bahwa:

"Menurut saya, organisasi keagamaan tidak seharusnya terlibat langsung dalam politik praktis, karena hal itu bisa mengaburkan misi dakwah dan pendidikan yang menjadi fokus utama. Namun, saya juga memahami bahwa organisasi keagamaan memiliki peran moral politik, yaitu memberi panduan etika, nilai, dan arah moral kepada umat dalam kehidupan berbangsa. Jadi, peran politiknya bukan dalam konteks dukung-mendukung partai, tetapi dalam menjaga agar politik tetap berpijak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan" (Wawancara dengan Muhammad Fakhri Hasibuan, 2025).

Sedangkan Pimpinan Al-Washliyah mengatakan bahwa:

"Pandangan saya terhadap politik praktis itu banyak negatifnya, banyak yang tidak baik didalamnya". (Wawancara dengan Muhammad Irfan, 2025).

Pimpinan IPNU menceritakan sedikit tentang keterlibatan nahdlatul ulama dalam politik praktis:

"Secara historis, Nahdlatul Ulama (NU) memang pernah terlibat dalam politik praktis, terutama pada masa 1950-an hingga 1970-an, ketika NU menjadi partai politik dan ikut dalam pemilu. Namun, sejak Khittah 1926 ditegaskan kembali pada tahun 1984, NU – termasuk badan otonom seperti IPNU – kembali ke posisi semula sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fokus pada dakwah, pendidikan, dan kemasyarakatan. Meski demikian, hubungan dengan dunia politik tetap terjalin dalam konteks moral dan kebangsaan, bukan kepentingan praktis" (Wawancara dengan Muhammad Fakhri Hasibuan, 2025, 13:00 WIB).

Disinggung tentang keterlibatannya di dalam politik praktis, Al-Washliyah membantah pernah ikut dalam politik praktis dan mengatakan bahwa:

"Al-Washliyah tidak pernah terlibat dalam politik praktis, karna didalam AD/ART Al-Washliyah memfokuskan Dakwah dan Pendidikan" (Wawancara dengan Muhammad Irfan, 2025).

Pimpinan IPNU juga menjelaskan apa yang melatarbelakangi sebuah organisasi melakukan politik praktis:

"Biasanya, keterlibatan organisasi keagamaan dalam politik praktis dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik, atau untuk melindungi kepentingan umat di ruang politik. Namun, kadang juga karena adanya dorongan internal dari sebagian anggota yang memiliki aspirasi politik pribadi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar motivasi perjuangan itu tetap murni untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan individu atau golongan" (Wawancara dengan Muhammad Fakhri Hasibuan, 2025).

Pimpinan Al-Washliyah juga memberikan pandangannya tentang apa yang melatarbelakangi sebuah organisasi terlibat dalam politik praktis:

"Guna mewujudkan tujuan dan program mereka melalui kebijakan publik. Sebuah Organisasi melakukan politik praktis untuk merebut, mempertahankan atau mempengaruhi kekuasaan" (Wawancara dengan Muhammad Irfan, 2025).

Penulis menanyakan dampak positif dan negatif sebuah organisasi tergabung atau ikut serta dalam politik praktis dan beliau pun menjelaskan dampak dari sebuah organisasi melakukan politik praktis:

“Dampak positifnya, organisasi bisa memiliki akses lebih besar untuk memperjuangkan aspirasi umat di ruang kebijakan publik. Selain itu, kader-kadernya dapat terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan catatan, semua itu dilakukan secara proporsional, tanpa mengorbankan prinsip keorganisasian dan nilai-nilai moral. Selain itu, dampak negatifnya cukup signifikan, seperti terjadinya perpecahan internal, menurunnya kepercayaan publik, serta hilangnya fokus terhadap visi pendidikan dan dakwah. Politik praktis seringkali membawa kepentingan jangka pendek yang bisa menggeser nilai-nilai ideal organisasi. Karena itu, organisasi seperti IPNU harus sangat berhati-hati agar tidak terseret ke dalam arus politik yang bisa memecah belah kader” (Wawancara dengan Muhammad Fakhri Hasibuan, 2025).

Pimpinan Al-Washliyah juga memberikan pandangannya terkait dampak positif dan negatif sebuah organisasi terlibat dalam politik praktis:

“Organisasi lebih cepat berkembang, karena dengan berpolitik praktis, organisasi dapat lebih luas memperkenalkan organisasinya dihadapan publik. Sebaliknya, negatif dari sebuah organisasi melakukan politik praktis dapat cepat menghancurkan organisasi itu sendiri” (Wawancara dengan Muhammad Irfan, 2025).

Analisis Sikap dan Peran Pelajar Islam Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pimpinan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Al-Jam'iyatul Washliyah, dan Pelajar Islam Indonesia (PII), dapat disimpulkan bahwa ketiga organisasi pelajar Islam tersebut memiliki garis tegas untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka sepakat bahwa organisasi pelajar seharusnya fokus pada misi pendidikan, dakwah, dan pembinaan moral, bukan menjadi alat politik yang berpotensi memecah belah internal organisasi ataupun merusak tujuan awal perjuangannya. Para narasumber menekankan bahwa politik praktis sarat kepentingan jangka pendek dan pragmatis, sehingga dapat mengaburkan identitas, nilai dasar, serta arah gerak organisasi pelajar Islam (Murniati, 2025).

Secara khusus, IPNU menjelaskan bahwa meskipun organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa, hal tersebut tidak berarti harus terjun dalam dukung-mendukung partai atau kandidat tertentu. NU, termasuk IPNU di bawahnya, menegaskan peran politiknya hanya sebatas politik moral, yakni memberi panduan etik agar praktik politik di Indonesia tetap berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Sementara itu, Al-Washliyah menyoroti banyaknya dampak negatif politik praktis, seperti konflik internal, hilangnya fokus dakwah, dan rusaknya nama organisasi di mata publik. Posisi ini sejalan dengan PII yang menolak keras keterlibatan politik praktis karena dinilai dapat merusak iklim pembinaan pelajar dan bertentangan dengan Khittah Perjuangan organisasi (Firdausi & Djuyandi, 2024).

Walaupun ketiga organisasi menyadari bahwa keterlibatan politik praktis dapat menawarkan keuntungan strategis seperti akses terhadap kebijakan publik dan perluasan pengaruh, mereka juga menilai bahwa dampak negatifnya jauh lebih besar (Syauqi et al., 2024). Risiko seperti perpecahan kader, polarisasi, hilangnya kepercayaan publik, serta pergeseran visi organisasi menjadi ancaman nyata apabila organisasi pelajar menjadi alat politik praktis. Karena itu, ketiganya memilih peran edukatif dan transformasional, seperti memberikan pendidikan politik yang sehat, meningkatkan kesadaran kritis generasi muda, serta membimbing pelajar agar cerdas dalam mengambil sikap politik secara pribadi tanpa menyeret organisasi ke dalam konflik kepentingan (Kusyana et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi ideal organisasi pelajar Islam di Indonesia adalah tetap menjadi wadah pembinaan intelektual, spiritual, dan sosial generasi muda. Organisasi pelajar harus berdiri di garda terdepan dalam memperkuat moral, literasi politik, dan integritas pelajar, bukan justru larut dalam dinamika politik praktis. Melalui sikap tersebut, organisasi pelajar Islam diharapkan mampu menjadi kekuatan penyeimbang, pengawal moral bangsa, serta agen perubahan yang konsisten menjaga nilai keislaman dan tujuan mulia organisasi, sekaligus tetap responsif terhadap isu kebangsaan tanpa kehilangan arah perjuangan (Sukirno, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sikap netral Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara terhadap politik praktis merupakan pilihan ideologis dan etis yang berakar pada Khittah Perjuangan organisasi, bukan sekadar strategi pragmatis atau sikap apolitis. Netralitas tersebut dipahami sebagai bentuk politik moral yang menempatkan pendidikan, pembinaan kader, dan dakwah keislaman sebagai ruang utama pembentukan kesadaran kritis pelajar. Dalam konteks menguatnya politik pragmatis di kalangan organisasi masyarakat Islam, posisi PII menunjukkan bahwa organisasi pelajar Islam dapat berperan sebagai penyangga etika publik dan kekuatan penyeimbang demokrasi tanpa harus terlibat langsung dalam kontestasi kekuasaan, sekaligus menjaga integritas organisasi dan konsistensi nilai keislaman, kepelajaran, dan keindonesiaan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif terhadap organisasi pelajar Islam di berbagai daerah guna melihat variasi sikap dan strategi dalam merespons politik praktis. Selain itu, penelitian mendatang dapat menelaah secara lebih mendalam peran media sosial, dinamika generasi muda, serta efektivitas pendidikan politik berbasis etika Islam dalam membentuk orientasi dan kesadaran politik pelajar, sehingga kontribusi organisasi pelajar Islam terhadap penguatan demokrasi substantif dapat dipahami secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Hubungan Politik, Polisi dan Militer terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia pada Era Reformasi. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.52252>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15–30. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/1035/780>
- Kusyana, K., Zafarudin, M., & Hadi, S. H. (2024). Dinamika Politik Islam: Menyongsong Tantangan dan Meraih Peluang dalam Tata Kelola Politik dan Hukum di Pengadilan Agama Indramayu. *Bhakti Yustisia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.56457/BHAYU.V2I1.120>
- Latifah, L. (2024). History of Islamic Education in Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(2), 138–153. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i2.94>
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Murniati, M. (2025). Ruang publik dan Wacana Agama: Dinamika Dakwah di Tengah Polarisasi Sosial. *Khazanah: Journal of Religious and Social Scientific*, 1(1), 26–33.
- Noprijon, N., Samad, D., & Firdaus, F. (2025). Pendidikan Islam dan Kebangkitan Cendekia Muslim Indonesia: Islamic Education and the Rise of Indonesian Muslim Intellectuals. *Elektriase: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*, 15(02), 54–62. <https://doi.org/10.47709/ELEKTRIESE.V15I02.6391>

- Novrandianti, N., Firdaus, E., & Anwar, S. (2024). Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Awal Penyebaran Islam hingga Era Reformasi Pendidikan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 279–294. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2645>
- Pakpahan, I. L. M., Sumantri, P., & Nurasih, N. (2024). Peran Intelektual Indonesia dalam Politik pada Periode 1997-1999. *Polyscopia*, 1(1), 32–36. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1237>
- Pulungan, S., Anggeraini, L., Marfaung, Z., & Nurzannah. (2025). Muhammadiyah dan Politik : Politik Inklusif Muhammadiyah, Daarul Ahdiwasyahadah. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 2(1), 1–10. <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/241>
- Rachman, A., Yochanan, E., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.
- Rohman, A., Meraj, G., Isna, A., Taruna, M. M., Rachmadhani, A., Atmanto, N. E., & Nasikhin, N. (2024). Challenges in Islamic Education Curriculum Development: A Comparative Study of Indonesia, Pakistan, and India. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(6), 504–523. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.6.23>
- Sahputra, D. (2018). Analisis Komunikasi Organisasi Partai Politik Islam. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 9(1), 52–68. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1726>
- Saleh, M. (2024). Etika Komunikasi Islami: Solusi untuk Kesuksesan Organisasi. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 14(1), 27–46. <https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v14i1.2756>
- Sari, A. R., Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., & Mulyapradana, A. (2025). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. In *YPAD Penerbit*. YPAD . <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>
- Setiawan, A., Subaryana, S., & Lestari, S. N. (2024). Evolusi Ideologi: Pengaruh Tan Malaka terhadap Politik Indonesia, 1921-1949. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(3), 138–144. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1971>
- Sukirno, S. (2025). Dakwah dan Politik Identitas: Implikasi Kehidupan Keagamaan dalam Dinamika Sosial-Politik Kontemporer. *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 24(3), 941–950. <https://doi.org/10.29138/LENTERA.V24I3.1272>
- Surpani, S. (2023). Dinamika Islam Indonesia: Islam dan Politik di Indonesia. *Dialektika Publik*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.33884/DIALEKTIKAPUBLIK.V7I2.8145>
- Syauqi, M. A., Ali, A., & Kartika, R. (2024). Pengembangan Bahan Ajar Teks Debat Berbasis Sosial Politik Siswa Kelas X SMA. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 4(1), 26–30. <https://doi.org/10.57251/sin.v4i1.1211>
- Vira, A., Sumantri, P., & Azis, A. (2024). Peranan Tokoh Intelektual Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia pada Era Digital. *Polyscopia*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1235>
- Yahya, I., & Sahidin, S. (2022). Relation of Religion and Practical Politics: Contextual Adoption of Constitutional Islamic Jurisprudence for Muslim Clerics in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/HTS.V78I1.7405>